

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan politik Indonesia adalah PILKADA, dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah. PILKADA disebut juga Pemilihan Kepala Daerah adalah proses pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Tujuan utama dari PILKADA adalah untuk memperkuat demokrasi daerah, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Dalam situasi seperti ini, pemilihan kepala daerah bukan hanya pesta demokrasi tetapi juga sarana penting untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Semua calon pemilih harus memahami dinamika yang terjadi selama proses pemilihan yang mencakup banyak hal, mulai dari kandidat yang berkualitas tinggi hingga penyelenggara yang transparan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.

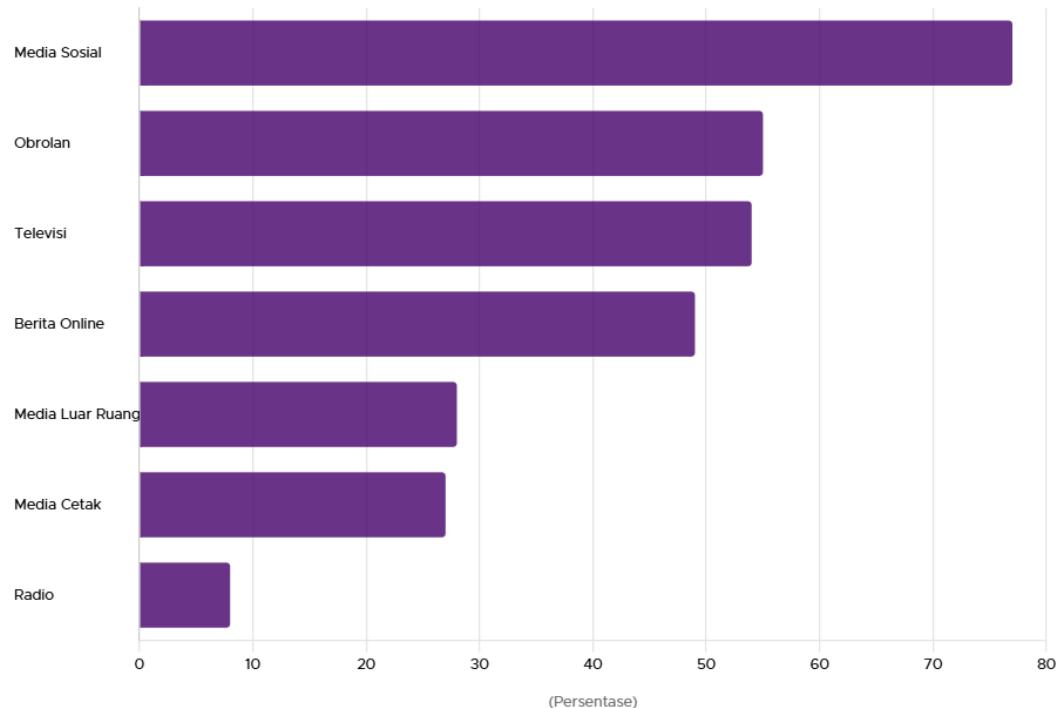
Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota telah diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024. Menurut Darmawan dkk, Pilkada 2024 menjadi titik penting karena diadakan serentak di seluruh Indonesia (Darmawan & Falah, 2022). Ini merupakan pelaksanaan Pilkada bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, sehingga kompleksitasnya

meningkat. Sejak penerapan Pilkada langsung melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung (UU No. 32 Tahun 2004). Sehingga partisipasi pemilih pilkada Jatim tahun 2024 meningkat menjadi 70,06%.

KPU Jatim telah mencatat angka partisipasi pilkada 2024 70% meningkat dibanding pemilihan gubernur tahun 2013 yang hanya sejumlah 59,34% dan tahun 2018 sejumlah 67,39%. Dari beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur, KPU juga telah mencatat ada 10 besar wilayah dengan tingkat partisipasi pilkada 2024. Urutan pertama ada pada wilayah Kabupaten Pamekasan sejumlah 87,57%, kemudian Kabupaten Sampang sejumlah 87,30%, Kabupaten Mojokerto 84,67%, Kota Batu 81,57%, Kota Kediri 80,5%, Kota Blitar 80,45%, Kabupaten Situbondo 79%, Kabupaten Madiun 78,72%, Kabupaten Probolinggo 78,51% dan terakhir ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro sejumlah 78,46% (suarasurabaya.net, 2024).

Media massa memegang peran sentral dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Televisi tetap menjadi salah satu sumber utama informasi politik bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks pemberitaan Pilkada. Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada 27 November 2024, televisi berada di posisi ketiga sebagai sumber informasi Pilkada dengan persentase sebesar 54% (GoodStats, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai platform digital berkembang pesat,

televisi konvensional masih memiliki daya jangkau dan kapasitas membentuk persepsi politik masyarakat.



Gambar 1 Sumber Informasi Pilkada masyarakat Indonesia

Sumber: *Goodstats* diakses pada 03 Februari 2025

Hal ini menegaskan bahwa meskipun perkembangan teknologi digital semakin pesat, televisi tetap menjadi media yang paling populer di kalangan masyarakat. Di antara berbagai jenis media, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan media komersial, karena didanai oleh negara dan bertugas melayani kepentingan publik secara netral. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik badan hukum yang dibentuk oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005).

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah menyusun RUU dari UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1, LPP merupakan Lembaga Negara Penyelenggara Penyiaran Publik yang bersifat independen, profesional, tidak partisan, dan tidak komersial untuk kepentingan masyarakat yang siarannya dipancarluaskan dengan menggunakan sistem siaran digital teresterial melalui jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio (RUU Tentang Penyiaran Tahun 2024). TVRI Jawa Timur sebagai bagian dari Lembaga Penyiaran Publik berperan dalam melayani kepentingan publik dengan menyediakan program berita dan informasi yang berimbang berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya (UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002).

Sebagai lembaga yang didirikan untuk melayani kepentingan publik, lembaga penyiaran publik adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, menjunjung tinggi prinsip netralitas, khususnya dalam hal penyebaran informasi publik yang sehat bebas dari pengaruh politik (UU No. 32 Tahun 2002). Kepublikan dalam penyiaran publik berfokus pada upaya lembaga penyiaran untuk melayani kepentingan masyarakat luas dengan menyediakan informasi yang objektif, seimbang, dan mendukung demokrasi. Konsep kepablikan ini menekankan bahwa media penyiaran, khususnya lembaga penyiaran publik seperti TVRI di

Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi dan melayani kepentingan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Meskipun demikian, peran lembaga penyiaran publik dalam memenuhi kepentingan publik masih sangat penting. Menurut UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Lembaga penyiaran publik memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kepentingan publik dengan menyediakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau komersial (UU No. 32 Tahun 2002).

Tantangan politik sering kali mempengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Ini menjadi tantangan besar yang dihadapi TVRI Jawa Timur dalam menjaga netralitasnya di tengah-tengah afiliasi politik yang mungkin terjadi sehingga dapat memengaruhi isi pemberitaan. Maka sejak disahkannya UU Nomor 32 (2002) tentang penyiaran, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahannya adalah limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi medal maupun kepentingan kekuasaan (UU No. 32 Tahun 2002).

Disahkannya UU ini untuk menghindari yang pernah terjadi pada saat pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (UU No. 32 Tahun 2002). Sistem penyiaran yang masih di tangan pemerintah, sebagai alat

strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggenggkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu, tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni negara rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha (KPI, 2017). Sehingga salah satunya LPP TVRI Jawa Timur mendapat pengawasan dari komisi penyiaran Indonesia, dalam proses penyampaian informasi pemberitaan yang mungkin bisa terjadinya afiliasi politik.

Afiliasi politik dalam konteks lembaga penyiaran publik seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Timur merupakan isu krusial karena berpotensi menggeser independensi dan objektivitas pemberitaan. Afiliasi politik dapat dimaknai sebagai proses penggabungan dua kelompok yang berbeda menjadi satu kesatuan (Amir, 1987). Istilah *affiliate* merujuk pada tindakan memasukkan seseorang menjadi anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Menurut W. Surya Endra, afiliasi politik adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih kelompok kepentingan yang bersatu untuk mencapai tujuan politik tertentu (Surya, 1979). Pemahaman ini menunjukkan bahwa relasi antara lembaga penyiaran dan kekuatan politik tertentu dapat membentuk kecenderungan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa afiliasi politik memiliki potensi untuk merubah keputusan editorial dan pola penyajian berita oleh media penyiaran publik. Media yang seharusnya bersikap netral sering kali

menunjukkan kecenderungan pada pihak politik tertentu, terutama selama masa pemilu atau dalam liputan yang melibatkan kepentingan politik, baik lokal maupun nasional. Penelitian Retpitiasari dan Faqih (2021) mengungkapkan bahwa pada Pilkada Jawa Timur tahun 2020, beberapa media terindikasi terlibat dalam kampanye politik terselubung melalui penyajian berita yang tidak seimbang. Penelitian lain menyoroti peran retorika politik dalam debat publik yang disiarkan media penyiaran publik, yang memperlihatkan adanya keterkaitan antara afiliasi politik dan konstruksi pesan yang disampaikan. Sujoko (2021) menyatakan bahwa kandidat politik kerap memanfaatkan media untuk menyampaikan visi, misi, dan program secara strategis, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam pemberitaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa penyebaran informasi selama masa pemilihan umum kerap dikondisikan oleh kedekatan media dengan aktor politik tertentu.

Selain itu studi Retpitiasari et al, mengungkapkan bahwa lembaga seperti KPID Jawa Timur secara signifikan memantau lembaga seperti TVRI, menjamin kepatuhan terhadap aturan dan ketidakberpihakan dalam pemberitaan (Retpitiasari & Faqih, 2021). Namun TVRI dalam beberapa tahun terakhir bergulat dengan tantangan menjunjung tinggi otonomi jurnalistik. Berbagai contoh menunjukkan kecenderungan untuk mendukung kampanye politik tertentu. Ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana afiliasi politik membentuk kebijakan editorial di televisi, khususnya di dalam ranah jurnalisme regional di Jawa Timur.

Untuk mengetahui lebih dalam, peneliti memfokuskan penelitian menggunakan teori ekonomi politik media menurut Vincent Mosco. Teori ini melakukan pendekatan kritis dalam studi komunikasi yang menyoroti hubungan kompleks antara media, teknologi, dan kekuatan politik dalam konteks pemberitaan pilkada. Menurut Mosco, teori ini dalam bukunya *The Political Economy of Communication* (2009) di dalamnya, ia menjelaskan bahwa media berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi tetapi juga sebagai lembaga ekonomi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan modal.

Konsep politik media menurut Vincent Mosco (2009) terdiri atas tiga elemen utama, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasasi. Komodifikasi dipahami sebagai proses perubahan suatu nilai atau objek menjadi bernilai tukar, yang dalam konteks media terbagi ke dalam tiga bentuk: komodifikasi konten, khalayak, dan tenaga kerja media. Spasialisasi merujuk pada proses yang mengatasi hambatan geografis dalam penyebaran informasi. Strukturasasi berkaitan dengan pembentukan dan reproduksi hubungan sosial melalui praktik media. Dalam konteks pemberitaan Pilkada, teori ekonomi politik media ini digunakan untuk menganalisis bagaimana TVRI Jawa Timur menyajikan berita politik selama Pilkada 2024, khususnya dengan meninjau aspek komodifikasi konten di tengah kemungkinan adanya afiliasi politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana berita Pilkada dikemas sebagai komoditas informasi yang melibatkan kepentingan tertentu dalam ruang publik.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang secara sadar ditetapkan oleh peneliti untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Cakupan penelitian hanya terbatas pada lembaga penyiaran publik, yaitu TVRI Jawa Timur, tanpa membandingkannya dengan media penyiaran lain seperti televisi swasta, radio, atau media daring. Temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh media massa. Analisis hanya difokuskan pada isi berita yang ditayangkan melalui kanal televisi konvensional, termasuk siaran langsung yang diunggah ke kanal YouTube resmi TVRI Jawa Timur. Konten digital lainnya, seperti unggahan media sosial atau situs web resmi TVRI, tidak termasuk dalam objek kajian.

Penelitian ini tidak membahas dimensi efek komunikasi, seperti dampak pemberitaan terhadap opini publik, preferensi pemilih, atau perilaku audiens. Penelitian ini juga tidak menganalisis tanggapan pemirsa terhadap pemberitaan yang disajikan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menyentuh aspek reception analysis atau studi audiens. Secara temporal, penelitian ini dibatasi hanya pada periode kampanye Pilkada 2024, yaitu 25 September sampai 27 November 2024. Semua data dan informasi yang berasal dari luar periode tersebut tidak dianalisis dalam penelitian ini, meskipun mungkin memiliki keterkaitan secara tidak langsung.

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, sehingga tidak membahas secara mendalam mengenai konteks sosial, politik, atau kebijakan redaksional di balik penyajian berita. Penelitian ini tidak menyertakan wawancara dengan jurnalis, editor, atau pihak manajemen TVRI Jawa Timur yang mungkin

memiliki pengaruh terhadap arah pemberitaan. Dengan batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian ini tetap terarah, fokus, dan dapat menyajikan analisis yang tajam serta mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana TVRI Jawa Timur menyajikan berita PILKADA tahun 2024?
2. Bagaimana gambaran afiliasi dalam penyajian berita PILKADA oleh TVRI Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana TVRI Jawa Timur menyajikan berita PILKADA tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana afiliasi dalam penyajian berita PILKADA oleh TVRI Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana Lembaga Penyiaran Publik di antara afiliasi politik dan kepublikan pada pemberitaan pilkada di TVRI Jawa Timur 2024. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai media politik dan komunikasi dan dapat membantu mengembangkan teori tentang hubungan antara afiliasi politik lembaga penyiaran dan objektivitas pemberitaan, serta memberikan dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Lembaga Penyiaran Publik dalam meningkatkan kualitas dan objektivitas pemberitaan. Dengan mengidentifikasi pola-pola bias dalam pemberitaan, lembaga penyiaran dapat merumuskan kebijakan editorial yang lebih baik, melatih jurnalis untuk menjaga netralitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan. Bagi peneliti diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejauh mana TVRI Jawa Timur sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam menjaga netralitas dan independensinya dalam menyajikan berita PILKADA tahun 2024 di tengah tekanan afiliasi politik.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pemberitaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Timur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik menyajikan berita Pilkada, dalam konteks antara afiliasi politik dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang seharusnya bersifat netral, independen, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai posisi LPP TVRI yang secara ideal harus mengedapankan nilai-nilai kepribadian dan independensi, namun dalam praktiknya sering kali

dihadapkan pada tekanan politik atau kepentingan pemerintah atau penguasa. Objek dalam penelitian ini adalah video pemberitaan politik yang berhubungan langsung dengan Pilkada, yang ditayangkan pada program berita utama TVRI Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Hari Ini”, selama periode kampanye. Masa kampanye dipilih sebagai periode penelitian karena merupakan fase krusial di mana media memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait calon yang bersaing (McNair, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini dipilih untuk mengukur secara sistematis dan objektif unsur-unsur tertentu dalam isi berita, seperti kecenderungan yang muncul dalam berita terkait calon gubernur Jawa Timur, frekuensi kemunculan tokoh politik, serta bentuk representasi yang diberikan kepada masing-masing kandidat. Penelitian juga memanfaatkan instrumen kategorisasi isi berita, yang melibatkan indikator-indikator kuantitatif untuk menilai adanya potensi keberpihakan atau afiliasi politik dalam berita tersebut. Secara konseptual, ruang lingkup penelitian ini mengukur sejauh mana Lembaga Penyiaran Publik menjalankan fungsinya sebagai saluran informasi yang netral dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kekuasaan atau partai politik tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, dalam konteks politik, potensi afiliasi dengan pihak tertentu dapat berimbas terhadap objektivitas pemberitaan, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengukur tingkat keberimbangan serta kecenderungan

dalam penyajian berita Pilkada (Haryanto, 2015). Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup media publik LPP TVRI Jawa Timur, isi pemberitaan Pilkada 2024 pada program Jawa Timur Hari Ini, indikator afiliasi politik dan nilai kepublikan dalam isi berita, serta pendekatan analisis isi kuantitatif terhadap tayangan berita.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, transliterasi dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup

penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori, penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling, sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dari deskripsi data masing-masing variabel dengan teknik statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan serta penguatan atas temuan penelitian dan membandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup.